

## RELEVANSI DAN AKTUALISASI TEOLOGI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MENURUT HARUN NASUTION

Muhammad Arifin

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: [muarzu@yahoo.com](mailto:muarzu@yahoo.com)

Diterima: 5 Maret 2014; Disetujui: 17 April 2014

---

**Abstract:** This article analyses relevancy and actualization of theology, which is introduced by Harun Nasution, with the social life. Further, it will be drawn to Indonesia community life in order to result a thought frame that shapes scientific and logic attitude without leaving the basic value of Islamic teachings. This research finds that the Harun Nasution concept on Rational Theology has relevancy to Indonesia community life, in which its relevancy values is closer to modern society life. By having such concept, society is expected to become critics to social phenomena that they encounter on daily basis.

**Abstrak:** Kajian dalam tulisan ini berupaya menganalisa relevansi dan aktualisasi teologi dalam kehidupan sosial menurut Harun Nasution untuk kemudian diasosiasikan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan di Indonesia, sehingga akan muncul satu kerangka berpikir yang mengacu pada sikap ilmiah dan logis tanpa melepaskan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Dalam tulisan ini penulis menemukan bahwa konsep teologi rasional Harun Nasution memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan nilai relevansi yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat modern. Dengan demikian diharapkan masyarakat memiliki rasa kritis terhadap berbagai fenomena sosial yang dihadapinya.

**Keywords:** Teologi, kehidupan sosial, Harun Nasution.

---

### Pendahuluan

Harun Nasution adalah seorang pemikir rasional yang membawa pengaruh besar dalam khazanah pemikiran Islam di Indonesia. Beliau telah mengupayakan dengan kemampuan intelektualnya agar teologi yang sebelumnya dianggap sebagai ilmu langit untuk dibumikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sosial. Dalam kaitan ini, Mohammad Arkoun mengatakan bahwa seharusnya pemikiran teologis bergerak tidak hanya dalam bentuk vertikal: normatif-doktrinal-religius, tetapi juga bergerak secara horizontal: historis-empiris-sosiologis.<sup>1</sup>

Harun Nasution memandang teologi rasional sesuai untuk masyarakat modern karena ia memiliki konsekuensi erat dengan perbuatan manusia dalam hidup keseharian. Pada bagian ini penulis akan membahas pandangan Harun

---

<sup>1</sup>Mohammed Arkoun. "Metode Kritik Akal Islam" wawancara Hashem Shaleh dengan Mohammed Arkoun dalam *al-Fikr al-Islam: Naqd wa Ijtihad*, terj. Ulil Abshar Abdalla dalam *Jurnal Ulumul Quran* 5, No. 5 (1994), 163.

Nasution tentang kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai implikasi pemahaman teologi yang telah memasyarakat. Pembahasan mencakup relevansi dan aktualisasi teologi dalam aspek pendidikan, politik, budaya, dan sosial kemasya-rakatan.<sup>2</sup> Gambaran pemikiran Harun Nasution berkenaan dengan aktualisasi teologi dalam kehidupan sosial dalam berbagai dimensi ini menjadi bagian penting yang dipaparkan dalam artikel ini.

### **Dimensi Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyebaran ilmu-ilmu keislaman ke dalam masyarakat. Sudah sejak lama pendidikan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Berbagai hasil pemikiran tokoh filsafat klasik dikembangkan kembali melalui pendidikan. Pendidikan Islam juga dikembangkan melalui proses *tarbiyah* oleh para Rasul hingga ajarannya sampai untuk generasi sekarang ini. Karenanya pendidikan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari agama. Karena mustahil agama akan berkembang tanpa pengembangan pendidikan yang memadai.

Pengembangan pendidikan dalam Islam harus dilandasi oleh pemikiran rasional sehingga agama tidak bersifat statis tetapi dinamis. Dalam sejarah peradaban manusia hanya pemikiran rasional yang mampu memajukan masyarakat. Pemikiran rasional mengembangkan berbagai teori pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi manusia dalam mengembangkan peradabannya. Hal ini dapat disaksikan bagaimana pemikiran filsafat Yunani masih memberikan implikasi besar dalam pengembangan masyarakat saat ini.

Menurut pandangan Harun, selama ini umat Islam belum menggunakan potensi pemikiran rasional dengan optimal. Hal ini menjadi perbedaan mendasar antara Barat dan Timur, yaitu penggunaan akal secara maksimal. Masyarakat Barat menjadikan akal sebagai landasan dalam pemikiran sehingga melahirkan karya-karya inovatif yang mendukung peradaban mereka.<sup>3</sup> Sementara masyarakat Timur menempatkan rasionalitas dalam tatanan doktrin yang menjadikan mereka stagnan dalam berkarya. Namun demikian, masyarakat Barat menggunakannya secara berlebihan sehingga melupakan aspek spiritual. Karenanya mereka masuk ke dalam tatanan masyarakat materialis dan kapitalis.

Pendidikan Islam pada dasarnya memasukkan dimensi agamis atau spiritual sesuai dengan esensi manusia dalam pandangan Islam. Harun menjelaskan bahwa manusia memiliki dua dimensi yang saling berhubungan, materi dan immateril. Unsur materi memiliki dua daya yakni daya rasa di materi dan materi. Unsur materi memiliki dua daya yakni daya rasa di dada

---

<sup>2</sup>Harun Nasution. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung: Mizan, 1994), 89.

<sup>3</sup>*Ibid.*, 287.

dan daya pikir di kepala. Materi berasal dari tanah sementara bagian immaterilnya akan kembali ke alam ghaib.<sup>4</sup>

Islam menekankan pendidikan yang berlandaskan pada “dada” (*qalbiah*) dan “kepala” (*aqliah*) sekaligus. Alquran menekankan pentingnya moralitas dalam kehidupan, seperti kemurahan hati, tolong menolong, hormat dan berterima kasih, sikap damai, tidak berdusta dan lain sebagainya. Inilah inti peradaban Islam yakni bukan hanya pada akal pikiran dan rasionalitas tetapi pada akhlak dan budi pekerti mulia.<sup>5</sup>

Integritas pendidikan antara *qalbiah* dan *aqliah* ini merupakan hasil pendidikan yang diwariskan Nabi serta sahabat. Pada masa perkembangan Islam periode awal<sup>6</sup> pendidikan tidak dipisahkan menjadi pendidikan umum dan agama. Alquran juga tidak memisahkan antara pendidikan umum atau agama, sebab keseluruhan ilmu pengetahuan merupakan hal yang penting bagi umat sehingga harus dipelajari. Menurut Harun Nasution, hal ini bukan keyakinan ulama dan umat Islam semata, beberapa orientalis juga mengatakan hal yang sama. Harun mengutip Tor Andre yang mengatakan bahwa Alquran memiliki corak idealis yang jelas, di antaranya adalah kemurahan hati, kesediaan menolong orang lain, saling menghormati, berterima kasih kepada orang tua, pemurah, sikap damai, tidak melakukan zina, tidak bersumpah palsu, tidak buta dan tuli terhadap teguran untuk kebaikan dan cinta sesama manusia.<sup>7</sup>

Penegasan ini mengindikasikan bahwa pendidikan dalam Islam merupakan pendidikan yang integral dan bukan pendidikan dualisme seperti yang berlang-sung selama ini. Pendidikan integral menempatkan semua subjek dalam satu kesatuan yang utuh. Sehingga dalam perspektif ini pendidikan Islam menginginkan lahirnya Muslim yang menguasai berbagai pengetahuan (*interdisipliner*) yang berkaitan dengan kehidupannya di dunia dan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya di akhirat kelak.

Menurut Harun Nasution pendidikan yang tidak integral dimulai dari penentangan sejumlah ulama Islam abad pertengahan terhadap rasionalisme dalam berpikir. Hal ini menyebabkan berkembangnya kejumudan dalam berpikir sehingga cendekiawan Muslim yang sebelumnya telah mengembangkan berbagai pengetahuan eksakta mundur kembali. Maka saat Barat menguasai dunia Islam pengetahuan tersebut dikembangkan di Barat dan menjadi sesuatu yang amat dibanggakan di sana.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, 37.

<sup>5</sup>*Ibid.*, 38.

<sup>6</sup>Harun Nasution membagi sejarah perkembangan Islam dalam tiga periode, *pertama* periode awal yakni masa Nabi, sahabat dan khulafaur rasyidin dan kekhilafahan yang mencapai puncak kejayaan ilmu pengetahuan. *Periode kedua*, periode kegelapan, dimulai sejak kejatuhan Baghdad 1285 M sampai 1700 M. *Ketiga*, periode modern yakni munculnya pemikiran pembaruan di dunia Islam pada abad 17 sampai sekarang. Lebih lanjut lihat Harun Nasution, *Islam Rasional*, 88.

<sup>7</sup>*Ibid.*, 216.

Ketika memasuki abad ke-17, Barat kembali masuk ke dunia Islam, mereka kembali membawa hasil pengetahuan yang dulu pernah mereka dapatkan di dunia Islam. Generasi Islam saat itu sadar bahwa apa yang dibawa Barat sangat berguna dalam kehidupan mereka. Selanjutnya berdirilah sekolah-sekolah yang khusus mempelajari tentang ilmu pengetahuan baru yang dibawa Barat tersebut. Pengajaran pengetahuan tersebut berbeda dengan pengajaran agama, baik lembaga, metode, media dan lain sebagainya. Kondisi inilah yang kemudian berkembang menjadi pendidikan dualisme dalam dunia Islam.<sup>8</sup>

Pemisahan seperti ini didukung oleh filsafat manusia yang berkembang di Barat. Pemikiran filsafat Barat modern beranggapan bahwa manusia adalah unsur jasmani yang keseluruhannya terdiri dari materi. Karenanya pendidikan ditujukan untuk melancarkan penalaran dalam akal. Hasil dari pendidikan ini adalah terciptanya manusia yang badannya sehat dan nalarnya bagus. Mereka mampu mengembangkan berbagai perangkat pendukung kehidupan dengan cepat yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Namun mereka kering secara nurani dan perasaan. Karenanya pendidikan seperti ini menyebabkan berkembangnya pengetahuan yang tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Harun Nasution menegaskan bahwa pendidikan harus seiring dan tidak terdapat dualisme seperti yang ada selama ini. Pendidikan integral menempatkan pendidikan agama pada kedudukan yang sama pentingnya dengan pendidikan sains. Keduanya merupakan bagian yang esensial dan integral dari sistem pendidikan umat. Tidak tepat pula kalau di dalam pendidikan agama menomor-duakan pendidikan sains dan tidak tepat pula kalau pendidikan sains dianak-emaskan dan pendidikan agama dianak-tirikan. Keduanya harus dipandang sebagai anak emas.<sup>9</sup>

Selain masalah dualisme pendidikan, Harun juga membahas masalah pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan Islam dewasa ini. Dalam hal ini Harun berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat di belahan dunia Timur (yang umumnya dihuni umat Islam) merupakan umat yang tertinggal jika dibandingkan dengan umat yang lain (Eropa). Sedangkan dalam doktrin dan ajaran, Islam memiliki kesempurnaan dan ketinggian dibandingkan dengan kepercayaan masyarakat lain.

Menurut Harun, kenyataan ini terjadi karena pendidikan agama yang diberikan secara tradisional tidak mementingkan pemakaian akal dan pendidikan akhlak dan yang banyak dilakukan adalah memompakan pengetahuan agama kepada subjek didik. Dengan demikian pemakaian akal dalam porsi maksimal tidak dilakukan. Subjek didik lebih cenderung menghafal pelajaran daripada menalar atau menganalisa materi pelajaran.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, 40.

<sup>9</sup>*Ibid.*, 42.

Hal ini tentunya bertentangan dengan pesan Alquran dan Hadis Nabi Muhammad. Harun menegaskan bahwa baik Alquran maupun Hadis menekankan pentingnya penggunaan akal dalam belajar. Alquran menggunakan beberapa kata berbeda yang artinya hampir sama yakni memaksimalkan fungsi akal. Di antara kata-kata tersebut adalah; *ya'ilu* (memakai akal), *nazham* (melihat secara abstrak), *tafakkara* (berfikir), *fahima* (memahami), *faqih* (perbuatan berfikir), *tadzakkara* (memperhatikan, mempelajari), *tadabbaru* (berfikir), dll.<sup>10</sup>

Demikian juga dengan Hadis, yang menegaskan pentingnya pemakaian akal dalam belajar. Beberapa Hadis tentang ilmu pengetahuan menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan. Nabi mengatakan kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat (*long life education*). Bukan hanya menekankan pada masa, Nabi juga menekankan pendidikan yang interdisipliner yakni menuntut ilmu ke negeri lain (Cina). Hadis ini mengisyaratkan bahwa kaum muslimin tidak boleh hanya menguasai ilmu agama, tapi juga ilmu pengetahuan sosial dan teknik yang saat itu berkembang di Cina.<sup>11</sup>

Sebagai bahan perbandingan, penulis mencoba menganalisa pandangan Harun Nasution seputar pendidikan ini dengan jalan mengasosiasikan pandangan teologi *Qadariyah* di satu sisi dan *Jabariyah* pada sisi lainnya. Lingkup bahasannya tentu saja pada sistem pendidikan tradisional dan modern di Indonesia.

Menyangkut sistem pendidikan tradisional, Harun Nasution mengkritik dengan keras doktrin paksaan Tuhan (Jabariyah) yang diajarkan lembaga pendidikan tradisional yang khususnya dihubungkan dengan *Asy'ariyah*. Menurut pandangan beliau, doktrin ini menyangkal rasionalitas serta pilihan manusia, dan doktrin tersebut juga menjerumuskan pada gaya berpikir yang fatalistik yang membuat perkembangan politik, sosial dan ekonomi menjadi mustahil. Pendiriannya yang kokoh tentang persoalan ini mungkin, paling tidak sebagian, adalah reaksi terhadap konsep orang Jawa tradisional tentang persoalan sosial, yang secara umum digambarkan sebagai feodalistik, Pemikiran politik dan sosial orang Jawa tradisional sangat mengandalkan pada ketentuan Tuhan (Jawa; titah) untuk menjustifikasi sistem sosial yang hirarkis dan kaku. Konsep orang Jawa tentang *nrimo*, yang berarti penerimaan yang pasif terhadap takdir sembari berharap pahala dari Tuhan. Sikap ini sangat mirip dengan ajaran determinisme (takdir). Sebagian besar intelektual dari pemikir politik Indonesia modern sangat menentang elemen pemikiran tradisional ini. Mereka yakin bahwa pemikiran tradisional itu membuat dinamika bangsa dan ekonomi, menjadi mustahil untuk dicapai.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, 54.

<sup>11</sup>*Ibid.*, 57.

<sup>12</sup>Richard C. Martin, Marx Woodward dan Dwi S. Atmaja. *Geneologi Konflik*, 303-304.

Sedangkan sistem pendidikan dengan pendekatan *Qadariyah* lebih menekankan pemakaian daya akal dalam berpikir, penalaran yang bebas dan ilmiah. Dalam sistem ini pula pesan orisinil Alquran dapat dilestarikan.<sup>13</sup>

Harun lebih lanjut berasumsi bahwa pemaksimalan pemakaian akal dan berpikir teologi rasional dalam menuntut ilmu akan berdampak pada perbaikan akhlak dan peningkatan kemakmuran dalam masyarakat. Sebab berbagai aspek ajaran agama yang ada dalam Islam dipandang Harun memiliki dimensi akhlak di belakangnya. Dan hal ini hanya dapat dipahami jika pendidikan diberikan dengan menekankan penggunaan akal dan rasionalitas.

“Ternyata bahwa ibadah dalam Islam erat sekali hubungannya dengan pendidikan akhlak. Ibadah dalam Alqurandikaitkan dengan taqwa, dan taqwa berarti melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. Perintah Tuhan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik, sedangkan larangan Tuhan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang bertaqwa dengan demikian adalah orang yang menggunakan akalnyanya dan pembinaan akhlak adalah ajaran yang paling dasar dalam Islam.”<sup>14</sup>

Pandangan seperti ini bertentangan dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat (Indonesia) selama ini. Menurut Harun kalangan umat saat ini masih merasa takut dengan penafsiran rasional terhadap agama. Mereka cenderung menerima apa adanya dari tokoh-tokoh agama di daerahnya. Padahal dalam sejarah pemikiran keislaman, penggunaan akal bukanlah sesuatu yang asing sebagaimana dilakukan oleh teolog Mu'tazilah dan para filosof.<sup>15</sup>

Sebagai sebuah analogi komparatif, penulis mencoba membandingkan dua variabel yang berbeda dalam dimensi pendidikan ini, dimana di dalamnya terdapat dua orang pelajar yang menganut paham berpikir kontradiktif antara satu dengan lainnya. Katakanlah seorang pelajar menganut paham Jabariyah dan lainnya menganut paham Qadariyah, dimana pada saat bersamaan keduanya harus mengikuti ujian kelas.<sup>16</sup>

Kondisi yang sama harus dijalani oleh kedua pelajar ini, namun keduanya tidak lulus dalam ujian. Tindakan dan pemikiran yang mereka ambil selanjutnya jelas berbeda sebab di latar belakang oleh paham yang telah mereka anut. Pelajar yang menganut. Pelajar yang menganut paham Jabariyah akan membuat pernyataan bahwa semua yang telah terjadi pada dirinya adalah

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, 310.

<sup>14</sup>*Ibid.*, 60

<sup>15</sup>*Ibid.*, 61.

<sup>16</sup> Harun Nasution tidak berbicara khusus mengenai persoalan ini, namun setelah mencemati pandangan Harun seputar teologi rasional, kiranya dapat ditarik sebuah analogi, yaitu bagaimana sebuah kondisi tersebut saling berbeda satu sama lainnya. Dimana satu pihak berpakaian Jabariyah dan pihak lain berpandangan Qadariyah.

mutlak kehendak Tuhan. Implikasinya ia akan belajar lebih giat lagi dan ia harus pasrah serta ridha atas keputusan Tuhan.

Sedangkan bagi pelajar yang menganut paham Qadariyah, ia akan melihat bahwa ada yang salah dalam dirinya atas ketidaklulusannya dalam ujian. Implikasinya ia akan belajar lebih giat dan ia akan berusaha mencari tahu penyebab dari kegagalannya tadi. Kegagalannya bukanlah kehendak Tuhan melainkan kesalahan yang ada dalam dirinya sendiri. Artinya ia masih belum mengoptimalkan potensi yang diberikan Tuhan kepadanya.

### **Dimensi Politik**

Pembahasan masalah politik merupakan persoalan yang tidak habis-habisnya dalam masyarakat Islam, baik dari sisi praktis maupun teoritis. Dari sisi praktis, persoalan politik tidak memiliki konsistensi sejak zaman sahabat (*khulafa' al-rasyidin*). Pemilihan Abu Bakar berbeda dengan Umar, Usman lain lagi dan demikian juga Ali. Karenanya tidak ada konsep yang sama antara cendekiawan Islam tentang sistem politik dalam Islam. Masing-masing menafsirkan sesuai dengan pola pendekatan dan kepentingannya.

Munawir Sjadzali<sup>17</sup> membagi aliran pemikiran politik dalam Islam dalam tiga bagian; *pertama*, kelompok tradisional yang menempatkan Islam sebagai agama murni seperti yang dipraktekkan dalam kehidupan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Dalam pandangan kelompok Islam tidak boleh mendirikan negara kecuali dalam bentuk pemerintahan yang pernah dijalankan sahabat yakni kekhalifahan. Lebih jauh lagi kelompok ini menganggap apapun yang datang dari Barat adalah salah dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Kelompok ini merupakan kelompok tradisional yang menganggap agama sebagai kebenaran turun-temurun yang tidak mengalami perubahan penafsiran. Perbedaan zaman, manusia dan alam bukan berarti mengharuskan terjadinya perbedaan pemahaman agama, sebaliknya kondisi lingkungan alam itu sendiri yang harus diubah dan disesuaikan dengan agama (Islam). Maka dalam hal ini Islam dianggap harus dikembalikan dalam pemahaman sahabat generasi awal. Dengan demikian dalam bidang politik yang harus dan yang boleh dijalankan umat Islam sekarang ini adalah sistem kekhalifahan, seperti yang dipraktekkan oleh khalifah zaman awal Islam.

Kedua, kelompok yang mencoba membatasi peran agama dan peran umat sebagai warga negara dan politik. Dalam pandangan ini, agama ditempatkan pada posisi relasi vertikal dengan Tuhan semata. Artinya agama dan politik berada pada dimensi berbeda dan masing-masing berjalan sendiri. Kelompok ini beranggapan bahwa Islam sebagai agama berbeda dengan Islam sebagai peradaban dan kebudayaan. Islam sebagai agama harus ditempatkan pada dimensi relasi manusia dengan Tuhan yang terwujud dalam ibadah

---

<sup>17</sup>Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), 115-116.

*mahdah*. Sementara pada tataran kebijakan ekonomi, politik, pendidikan dan kebijakan yang berhubungan dengan manajemen kehidupan sosial, maka Islam tidak memberikan tuntunan.

Karenanya kelompok ini tidak mau menempatkan ajaran agama dalam politik dan menentang spritualisasi politik. Politik dan kenegaraan lahir sebagai wujud perkembangan budaya masyarakat manusia. Karenanya agama tidak bisa melibatkan diri secara langsung dalam mengatur tatanan dan struktur yang akan dibangun dalam menjalankan pemerintahan. Kelompok ini memberikan kebebasan kepada umat untuk mengambil, mengembangkan dan memakai sistem apapun yang dianggap sesuai dalam menjalankan roda pemerintahan demi kesejahteraan umat.

Kelompok ketiga adalah mereka yang tidak sepaham dengan kedua kelompok di atas. Mereka menolak kelompok pertama karena golongan ini menempatkan agama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan peradaban. Dalam hal ini Islam yang digunakan sesungguhnya bukanlah yang mengikuti cara Nabi, tetapi melakukan pola hidup yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan. Meskipun dalam prakteknya tidak sama dengan Nabi, namun dalam dimensi nilai itu semua merupakan ajaran Nabi. Sementara mereka tidak setuju dengan kelompok kedua karena pemisahan yang ekstrim antara agama dan politik tidak mungkin dilakukan. Pemisahan seperti ini tidak mungkin dilakukan karena seorang individu tidak mampu mengelola dua jiwa yakni jiwa keagamaan dan paham politik yang dianutnya.

Pada akhirnya mereka menawarkan pemikiran integral, di mana pemikiran politik dilandasi oleh nilai-nilai agama. Artinya, kebijakan kenegaraan dan politik yang dijalankan negara tidak serta merta mengikuti seperti apa yang telah dijalankan oleh *khulafa' al-rasyidin*, namun tetap mengacu seperti yang berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan budaya manusia. Namun pemilihan aliran atau paham politik yang akan dijalankan dalam dunia Islam harus di landasi dengan nilai-nilai keislaman yang universal. Artinya politik yang diusung oleh kelompok ketiga ini adalah politik modern dengan landasan nilai Islam.

Cendekiawan Muslim Indonesia umumnya masuk dalam kategori ketiga. Nurcholish Madjid misalnya, memandang politik sebagai wadah partisipasi umat untuk menentukan jalan yang benar dan jalan yang dapat digunakan untuk *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Setiap umat harus berpartisipasi dalam pemerintahan sekecil apapun yang bisa dilakukan karena itu merupakan bagian dari upaya dakwah dan implementasi syari'at dalam masyarakat.<sup>18</sup> M. Amin Rais dalam bukunya *Cakrawala Islam* menegaskan bahwa politik adalah penerapan nilai-nilai keislaman dalam

---

<sup>18</sup>Nurcholish Madjid. *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Cet. 4 (Jakarta: Paramadina, 2000), 559-570.

masyarakat. Amien menekankan bahwa *high politic* lebih utama daripada *low politic*. *High politic* merupakan aksi politik yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam membina relasi kehidupan manusia. Amien mengistilahkannya dengan “politik adiluhung”.<sup>19</sup> Dalam pandangan Amien, politik adiluhung adalah sikap politik yang mulia yang tidak menghalalkan segala cara demi mendapatkan maksud dan tujuannya. Pemaknaan dan pentingnya integralitas nilai-nilai agama dalam politik juga diungkapkan Kuntowijoyo. Ia juga dalam salah satu bukunya, *Pemikiran Politik Umat Islam*, Kunto membahas panjang lebar tentang relasi Islam dan Pancasila. Intinya Kunto sepakat bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai moral Islam dan bisa dianggap sejalan dan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>20</sup>

Harun Nasution sebagai seorang cendekiawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai rasionalitas tampaknya juga sepaham dengan aliran yang ketiga. Hal ini dapat disaksikan dalam pemikiran Harun Nasution tentang politik dan negara. Mengenai relasi agama dan negara Harun mengambil contoh Indonesia. Menurut pandangan Harun, Indonesia merupakan negara yang memegang asas-asas bagi sebuah negara Islam dan dasar negaranya juga tidak bertentangan dengan ajaran pokok dalam Islam.

Tokoh-tokoh Islam masa lalu di Indonesia telah memikirkan baik-baik bagaimana menempatkan Islam dalam tatanan dasar negara. Sehingga apa yang lahir agama. Karenanya tidak ada alasan bagi masyarakat Indonesia untuk menyatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam.<sup>21</sup>

Lain halnya dengan Harun Nasution, menurutnya sila-sila dalam Pancasila semuanya memiliki landasan agama. Sila pertama menyatakan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Harun, sila ini merupakan pembahasan awal dalam ajaran Islam, yakni Tauhid.<sup>22</sup> Hampir semua ulama besar Islam klasik membahas masalah tauhid. Intinya tauhid adalah pengesaan Tuhan, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Hanya kepada-Nya tempat menyembah dan juga hanya kepada-Nya manusia meminta pertolongan.

Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti adanya persatuan antar makhluk selain Tuhan dalam kesetaraan. Hal ini sebagai konsekwensi dari pemahaman tentang Tuhan sebagai pencipta. Paham ini memunculkan konsekwensi bahwa segala sesuatu selain Tuhan adalah makhluk dan semua makhluk memiliki posisi yang sama dan setara. Karenanya mereka bersaudara dan diperlakukan dalam posisi yang setara pula. Paham ini tentunya tidak berbeda dengan apa yang dimaknai Islam tentang makhluk dan

---

<sup>19</sup>Amien Rais, *Politik Adi Luhung*, (Yogyakarta: Al-Ruz, 1998), Bab I.

<sup>20</sup>Kuntowijoyo. *Pemikiran Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 17.

<sup>21</sup>*Ibid.*, 218.

<sup>22</sup>*Ibid.*, 218.

keadilan mereka.<sup>23</sup> Islam menjunjung tinggi keadilan perlakuan yang sama terhadap makhluk, menjunjung HAM, egalitarianisme dan humanisme.

Menurut Harun Nasution, persatuan Indonesia sebagai sila ketiga juga semakna dengan ajaran Islam, yakni persatuan suatu bangsa. Harun menjelaskan bahwa penciptaan manusia dalam puak dan bangsa bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain. Dengan demikian mereka bisa mengembangkan peradaban di kalangan mereka sendiri. Cinta akan kesatuan ini juga dikenal dengan *hub al-watan*, yakni cinta tanah air.<sup>24</sup>

Sila keempat tentang musyawarah juga memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Harun menegaskan bahwa Islam sangat mementingkan musyawarah. Hal ini bisa dilihat dari perilaku Nabi yang bermusyawarah dengan umatnya<sup>25</sup> padahal beliau seorang utusan dan keputusannya adalah kebenaran. Seandainya musyawarah tidak begitu penting, maka Nabi pasti akan mengambil keputusan sendiri atau meminta petunjuk Allah melalui wahyu-Nya sehingga menjadi ketetapan mutlak. Pentingnya musyawarah dalam Islam menunjukkan kepemimpinan Islam yang populis dan berlandaskan kerakyatan.<sup>26</sup>

Sila terakhir tentang keadilan sosial juga memiliki hubungan dan dimensi keagamaan yang kuat. Harun menegaskan bahwa salah satu sifat Allah adalah Maha Pengasih dan penyayang (*al-rahman dan al-rahim*). Allah juga Maha Adil dan menghendaki manusia bersikap adil antar sesamanya. Banyak ayat Alquran yang menegaskan pentingnya keadilan antar sesama.<sup>27</sup> Dengan keadilan ini kesetaraan manusia dan kesejahteraannya akan dapat diwujudkan.

Melihat keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan sila-sila dalam Pancasila tersebut di atas, Harun menegaskan bahwa sesungguhnya Pancasila sebagai landasan bernegara di Indonesia tidak bertentangan dengan Islam.<sup>28</sup> Lebih jauh bahkan Harun mengatakan bahwa tidak tepat kalau masih ada segolongan umat yang mempersoalkan pertentangan antara Pancasila dengan ajaran Islam.

Memasuki perbincangan politik pada tataran yang lebih luas Harun menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan pola pembentukan negara dan bentuk pemerintahan yang akan dijalankan umat Islam. Harun mengatakan:

“Baik Alquran sebagai sumber utama, maupun Hadis sebagai sumber kedua dari ajaran Islam, sebenarnya tidak ada yang menyebutkan bagaimana seharusnya bentuk negara dalam Islam. Jangankan bentuk negara atau sistem pemerintahan, tentang pembentukannya pun tidak ada teks ayat yang dengan tegas menyebutkannya. Maka timbul perbedaan

---

<sup>23</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional*, 219.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 221.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 223.

<sup>26</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional*, 223.

<sup>27</sup>Lihat a.l: Q.S. 16:90, Q.S. 59:7.

<sup>28</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional*, 221.

pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Ada yang mengatakan pembentukan negara dalam Islam adalah wajib, tetapi ada pula segolongan kecil yang berpendapat bahwa itu tidak wajib. Menurut mereka kalau ajaran Islam telah berjalan dalam masyarakat, negara dan pemerintahan tidak diperlukan.”<sup>29</sup>

Pendapat Harun di atas menggambarkan bahwa ia menganggap Islam tidak menetapkan bentuk negara. Masyarakat Islam sendiri berhak memilih dan mengembangkan pemikiran tentang bentuk negara yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi peradaban manusia secara keseluruhan. Apalagi dalam kondisi sekarang dimana komunikasi dan informasi semakin berkembang, tanpa penyesuaian diri, maka Islam sebagai sebuah bangsa akan tertinggal dibandingkan dengan bangsa di dunia.

### **Dimensi Budaya**

Agama dipahami dalam dua pengertian yang berbeda, inklusif dan eksklusif.<sup>30</sup> Dalam pengertian inklusif agama merupakan sistem kepercayaan yang mengedepankan perasan dan membenaran dengan kepentingan adanya seperangkat sentral kepercayaan yang mengatur kehidupan manusia. Contohnya adalah seperti apa yang disampaikan Emil Durkheim, yang menekankan pentingnya kesucian, kekudusan atau ketabuan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara pengertian eksklusif menekankan agama sebagai konfigurasi representasi-representasi keagamaan yang membentuk suatu alat kesucian, yaitu agama dalam bentuk khusus sosial-historis dan sosial-kulturalnya.<sup>31</sup>

Pembahasan mengenai Islam dan agama, Harun menempatkan agama dalam dua sisi tersebut di atas. Di satu sisi agama adalah masalah ritual kesucian, sementara di sisi lainnya agama adalah persoalan budaya. Namun demikian ia menegaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara pemahaman agama dalam masyarakat Barat dan masyarakat Timur. Perbedaan itu timbul sebagai akibat cara pandang terhadap manusia itu sendiri. Dalam pandangan Barat, manusia didefinisikan sebatas pada susunan fisik, jiwa dan akal. Berbeda dengan Timur yang tetap memandang manusia memiliki hati nurani.<sup>32</sup>

Agama dalam dimensi keyakinan akan kebenaran dipahami karena ajaran-ajaran agama berasal dari Tuhan dan sifatnya absolut. Hal ini menindikasikan bahwa manusia tidak dapat mengganggu-gugat dan mengotak-atik. Manusia yang yakin akan kebenaran tersebut harus mengikuti apa adanya, seperti apa yang diturunkan Tuhan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 222.

<sup>30</sup> Nurcholish Madjid. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1998), 135.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 136.

<sup>32</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, 288 – 289.

Akan tetapi Harun juga mengatakan bahwa tidak semua ajaran agama berasal dari Tuhan dan tidak berubah. Banyak kondisi manusia yang harus diatur sendiri oleh manusia tersebut dan tidak ada aturannya dari Tuhan. Tuhan hanya memberikan aturan dasar dan garis utama saja. Manusia yang bertugas menerjemahkan, menafsirkan dan membuat pengertian sehingga apa yang diberikan Tuhan tersebut sesuai untuk kehidupannya.

Pengertian ini di atas menunjukkan jika Harun telah menggarisbawahi bahwa agama bukanlah unsur dari kebudayaan. Agama merupakan aspek independen yang berdiri sendiri di luar kebudayaan. Budaya dan agama memiliki perbedaan signifikan, sehingga tidak dapat dikatakan yang satu menjadi bagian dari yang lainnya.<sup>33</sup> Namun demikian budaya memiliki pengaruh kuat dan besar dalam mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama dan hal ini menurut Harun memang diizinkan dalam agama.

Penafsiran agama dalam konteks modern dan penyesuaian nilai agama dengan budaya modern sesungguhnya menjadi agenda umat Islam sepanjang waktu. Kuntowijoyo mengatakan bahwa umat Islam dengan kesadaran normatifnya akan menjadi sebuah kelompok yang terus menerus dimotivasi oleh kesadaran subjektifnya untuk membela dan memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi.<sup>34</sup>

Secara lebih tegas Harun menggariskan bahwa budaya dalam Islam dipandang sebagai unsur tersendiri yang tidak berkaitan langsung secara hukum dengan ajaran Islam yang absolut. Karenanya pengembangan budaya tidak harus mengganggu dan bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya pula agama tidak menjadi penghalang bagi perkembangan budaya.

“Karena ajaran agama yang bersifat absolut sangat sedikit dan yang banyak adalah ajaran agama yang tidak bersifat absolut, maka tidaklah perlu dikhawatirkan bahwa agama akan menghambat perkembangan kebudayaan. Ajaran dasar itu, sebagaimana pada masa lampau, akan turut berkembang menurut perkembangan zaman. Agama tidak mesti menjadi penghambat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pembangunan pada umumnya.”<sup>35</sup>

Apa yang disampaikan tersebut tampaknya memang menjadi pandangan umum tokoh pembaharuan Islam modern di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Umumnya tokoh-tokoh Islam modern berpandangan bahwa budaya diizinkan berkembang sejauh tidak bertentangan dengan ajaran dasar agama. Hal ini semakin niscaya pada saat kehidupan manusia dihadapkan pada kondisi cukup kompleks dalam berbagai bidang sehingga menimbulkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan dengan logika. Selanjutnya hal inilah yang kemudian berkembang menjadi budaya masyarakat.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 289.

<sup>34</sup> Kuntowijoyo. *Paradigma Islam* (Bandung: Mizan, 1995), 41.

<sup>35</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, 241.

## Dimensi Sosial Kemasyarakatan

Pembahasan mengenai dimensi sosial kemasyarakatan dalam Islam diawali dengan pandangan Harun Nasution tentang Alquran. Hal ini dianggap penting karena Harun Nasution menganggap kehidupan sosial ke masyarakat yang berlandaskan agama (Islam) harus dilandasi pada Alquran dan Hadis. Sudah tidak diperdebatkan lagi bahwa keduanya menjadi sumber utama dalam membangun masyarakat. Berbagai falsafah hidup umat diambil dan dikembangkan dari nilai-nilai yang terdapat dalam Alquran dan Hadis.

Alquran merupakan kitab keagamaan yang diturunkan Allah untuk kehidupan manusia di dunia. Di dalamnya berisi sejumlah tatanan nilai yang harus dipedomani oleh umat manusia agar selamat dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi Alquran bukanlah kitab ensiklopedi kehidupan yang memuat segalanya tentang kehidupan manusia. Isi Alquran hanyalah petunjuk umum bagi manusia dalam berbagai bidang kehidupannya.

“Alquran sebenarnya bukanlah ensiklopedia yang di dalamnya dapat kita jumpai apa saja yang kita cari. Alquran pada hakikatnya, seperti dapat dilihat dari kandungannya, adalah buku agama yang dikirimkan Tuhan kepada masyarakat manusia untuk menjadi petunjuk (*hudnan*) bagi mereka dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Kalau disebut di dalamnya hal-hal yang ada hubungannya dengan fenomena alam, sejarah dan lain-lain, itu hanya sekilas sebagai argumen yang harus dipikirkan dan teladan yang harus dipahami oleh manusia.”<sup>36</sup>

Namun demikian ada sebagian umat yang menganggap Alquran mengandung segalanya. Hal ini didasari pada ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak melupakan sesuatu apapun dalam Alquran (al-An'am: 38). Selain itu juga terdapat dalam al-Nahl: 89 yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan Alquran untuk menjelaskan segala-galanya. Kedua ayat ini dipandang sebagai landasan untuk mengatakan bahwa Alquran mengandung segala yang dibutuhkan manusia. Pandangan ini tentu keliru dan tidak sesuai dengan akal yang waras dan tidak pernah dianut oleh para sahabat, tabi'in dan ulama klasik.<sup>37</sup>

Pandangan seperti ini telah membawa umat Islam dalam kejumudan dan ketertinggalan pemikiran. berbagai dimensi kemasyarakatan dan sosial yang dibangun dengan anggapan seperti ini tidak dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karenanya masyarakat Islam menjadi masyarakat yang bodoh dan tertinggal. Bahkan dalam beberapa hal umat Islam mengalami kesulitan dalam menafsirkan fenomena alam dan budaya yang baru, karena ketiadaan referensi dalam Alquran.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, 21-22.

<sup>37</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional*, 25.

Kejumudan, ketertinggalan dan kemiskinan pemikiran yang disebabkan pemahaman bahwa Alquran telah mengatur segalanya mulai dirasakan pada abad ke-17 Masehi saat dunia Islam dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Saat itu umat Islam menjadi bulan-bulanan bangsa Barat karena kebodohan dan ketertinggalan mereka dalam berbagai hal, terutama teknologi. Kesadaran ini mengakibatkan tumbuh dan bangkitnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan menekankan pentingnya rasionalisasi dalam pemahaman Islam dan urgensi penafsiran agama dalam perspektif yang lebih humanis dan fleksibel.

Perkembangan pemikiran di dunia Islam tersebut merupakan aspek penting yang menjadi konsensus pembaharuan adalah kebebasan berpikir dan berijtihad terhadap teks-teks agama. Selama ini dalam kaum muslimin berkembang keyakinan bahwa apa yang telah dibawa Rasul dan dijelaskan oleh para ulama sudah cukup dan dapat menjadi pegangan kaum muslimin. Karenanya dilarang bagi umat Islam untuk menafsirkan teks-teks agama selain apa yang telah dibuat oleh ulama sebelumnya.

Harun Nasution sebagai salah seorang pembaharu Islam di Indonesia memandang berbagai tatanan kehidupan masyarakat dalam dunia modern harus diatur sendiri oleh umat Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.<sup>38</sup> Salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam hal ini adalah mengembangkan prinsip kebebasan berpikir dalam umat Islam. Umat Islam harus yakin bahwa berpikir dan menafsirkan agama adalah hak semua orang. Masyarakat muslim harus menerjemahkan sumber-sumber Islam dalam tatanan modern. Hal ini tidak berarti bahwa sumber itu harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan linguistik atau dengan perkembangan antropologi. Perubahan yang dilakukan hanya dalam tatanan pendekatan (*approach*), metode (*method*) dan dalam tatanan tafsir dan pemahaman (*interpret and understanding*).

Harun Nasution sendiri dalam membahas masalah ketuhanan tidak memberikan sesuatu yang baru dan berbeda dengan apa yang telah diberikan oleh teolog atau pemikir Islam sebelumnya. Namun dalam berbagai literatur yang ada tampaknya Harun cenderung pada pemikiran ketuhanan yang diberikan Mu'tazilah dan Muhammad Abduh. Tidak jarang dalam pembahasannya ia "membela" pendapat Mu'tazilah dan mengkritik pendapat teolog lain.

Pendapat Harun tentang teologi lebih banyak pada implementasi dan konsekuensi yang ditimbulkan pemahaman teologi terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, 29.

## Kesimpulan

Harun Nasution merupakan seorang pemikir muslim rasional yang membawa pengaruh besar dalam khazanah pemikiran Islam di Indonesia. Beliau telah mengupayakan dengan kemampuan intelektualnya agar teologi yang sebelumnya dianggap sebagai ilmu langit untuk dibumikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sosial. Harun Nasution memandang teologi rasional sesuai untuk masyarakat modern karena ia memiliki konsekuensi erat dengan perbuatan manusia dalam hidup keseharian yang mencakup aspek pendidikan, politik, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arkoun, Mohammed. "Metode Kritik Akal Islam" wawancara Hashem Shaleh dengan Mohammed Arkoun dalam *al-Fikr al-Islam: Naqd wa Ijtihad*, diterjemahkan oleh. Ulil Abshar Abdalla dalam *Jurnal Ulumul Quran* 5, No. 5 (1994).
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Cet. 4*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- . *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Martin, Richard C., Marx Woodward dan Dwi S. Atmaja. *Geneologi Konflik Rasionalisme dan Tradisionalisme Islam: Post Mu'tazilah*. Yogyakarta: Ircisod, 1997.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1974
- . *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*. Bandung: Mizan, 1994.
- . *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Cet. II. Jakarta : UI-Press, 1986.
- . *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*. Jakarta: UI-Press, 1987.
- . *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 1986.

Panitia Penerbitan Buku dan Seminar 70 Tahun Harun Nasution, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam 70 Tahun Harun Nasution*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989.

Rais, M. Amien. *Politik Adi Luhung*. Yogyakarta: Al-Ruzz, 1998.

----- . *Tauhid Sosial*. Bandung: Mizan, 1999.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.